

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan atar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.....bertambah/berkurang sejumlah Rp.....sehingga menjadi Rp.....dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. ,-	
b. Bertambah	Rp. ,-	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. ,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. ,-	
b. Bertambah	Rp. ,-	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. ,-
Defisit setelah Perubahan		Rp. ,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. ,-	

2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. ,-</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. ,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. ,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. ,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. ,-</u>
Jumlah Pembiayaan surplus setelah perubahan		Rp. ,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. ,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. ,- |
- b. Dana perimbangan
- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Perimbangan setelah Perubahan | | Rp. ,- |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. ,- |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | | Rp. ,- |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | | Rp. ,- |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. ,- |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. ,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|--|-----------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. ,- |

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. ,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. ,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp.....

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	
Jumlah Pendapatan Darurat setelah Perubahan		Rp.....

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. ,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp.....

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah	Rp. ,-	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. ,-

f. Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah

1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah	Rp. ,-	
Jumlah Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah setelah Perubahan		Rp. ,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. ,-	
2) berkurang	Rp. ,-	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. ,-

b. Belanja Belanja Langsung

1) Semula	Rp. ,-	
2) Bertambah	Rp. ,-	
Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan		Rp. ,-

(2) Belanja tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. ,-	
2) berkurang	<u>Rp. ,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. ,-
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp.....
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp.....
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.,-	
2) berkurang	<u>Rp. ,-</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp.,-
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.,-	
2) Bertambah	<u>Rp.,-</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp.,-
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp.....
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah	<u>Rp.,-</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp.,-
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp.,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.,-	
2) Bertambah	<u>Rp. ,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.,-	
2) berkurang	<u>Rp. ,-</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp.,-
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.,-	
2) Bertambah	<u>Rp.,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
 - 1) Semula Rp. ,-
 - 2) Bertambah Rp.,-
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.,-

 - b. Pengeluaran sejumlah
 - 1) Semula Rp.,-
 - 2) Bertambah Rp.,-
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
 - 1) Semula Rp.,-
 - 2) Bertambah Rp.,-
 - Jumlah SILPA tahun anggaran setelah Perubahan Rp.,-

 - b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.....

 - c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.....

 - d. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan Rp.....

 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp.....

 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah Rp.,-
 - Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp.,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.....

 - b. Penyertaan modal (investasi) daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp.,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah Penyertaan modal (investasi) setelah perubahan Rp.,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula Rp.,-
2) Bertambah Rp.,-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp.,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp.....
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan
Obligasi daerah setelah perubahan Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA PALU,

H. RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2010 NOMOR 6